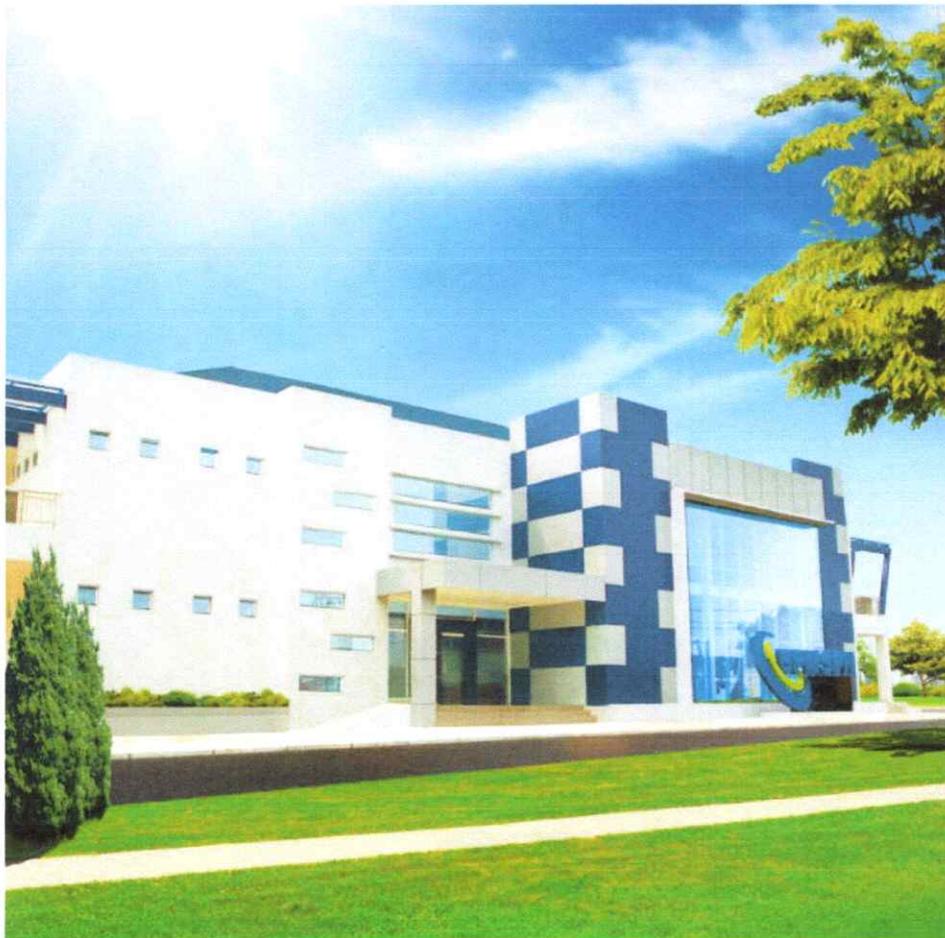


**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021**

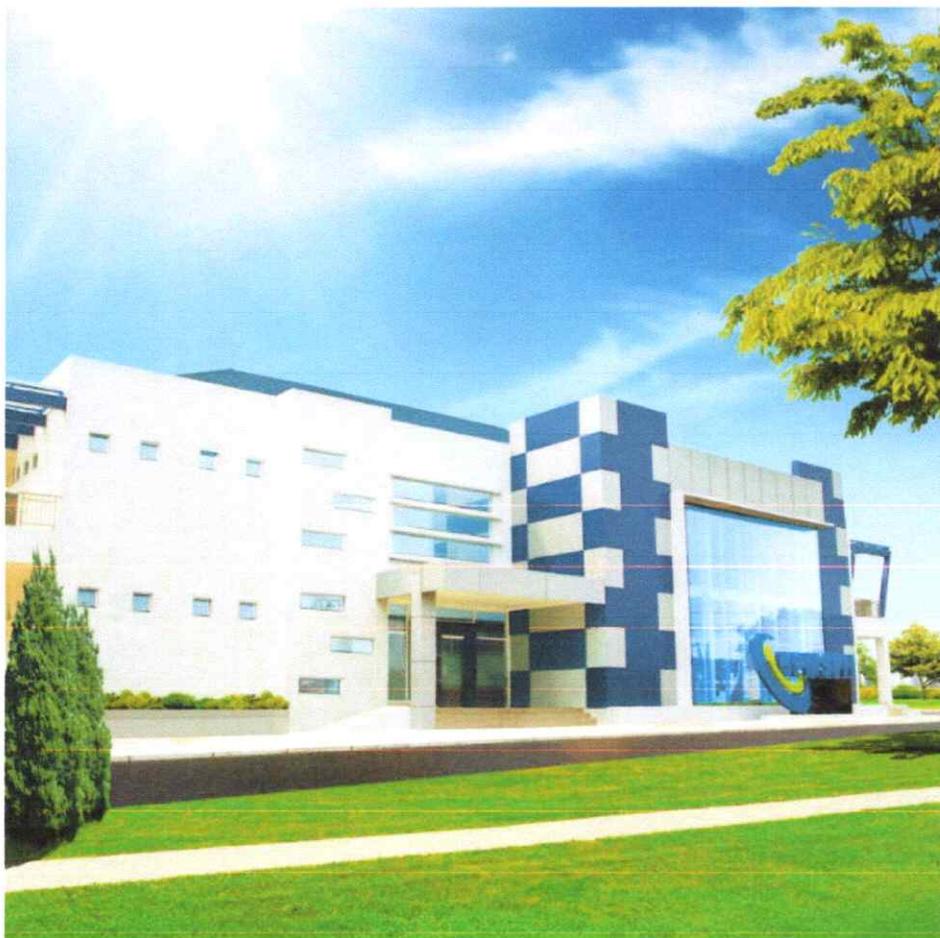
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**



JL. PEMUDA NO. 29A. KOTA BOGOR

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021**

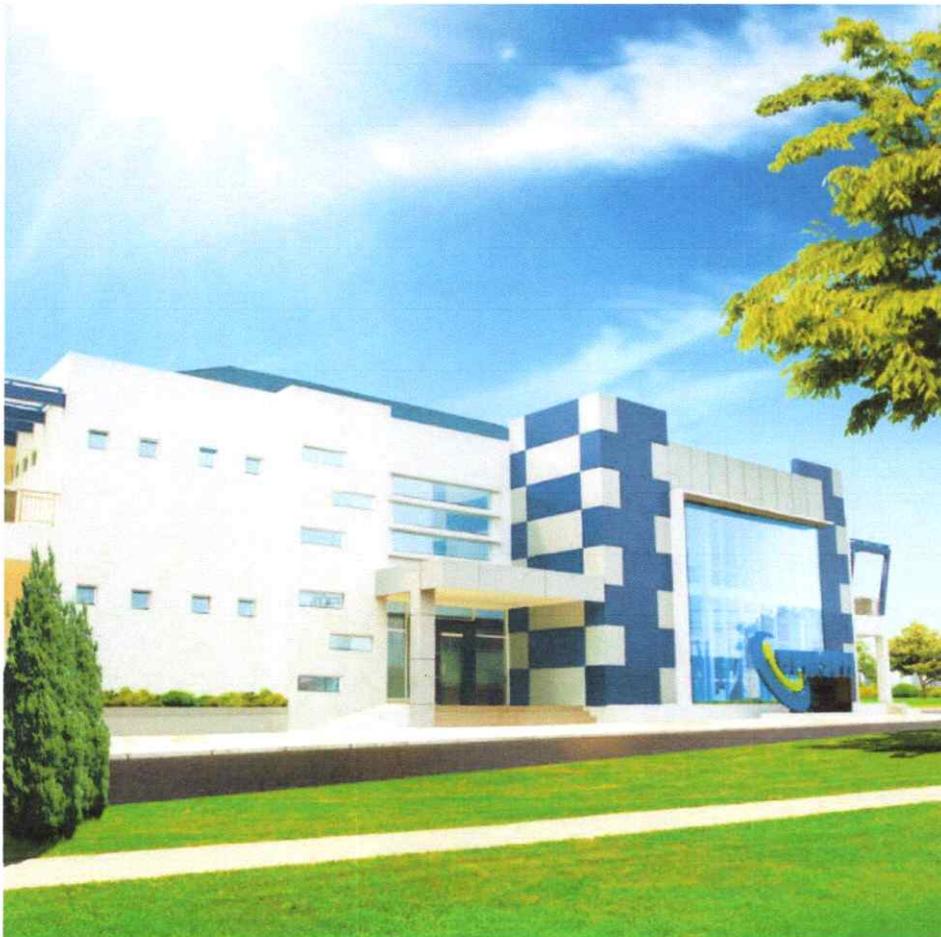
**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**



JL. PEMUDA NO. 29A. KOTA BOGOR

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2021**

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**



JL. PEMUDA NO. 29A. KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 21 juli 2021

Kepala Balai

Drh. Nasirudin M.Sc.

NIP. 19650508 199003 1 001



Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, 21 juli 2021

Kepala Balai,

Drh. Nasirudin M.Sc.

NIP. 19650508 199003 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp370.574.092,00 atau mencapai 73,53% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp504.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp5.363.484.134,00 atau mencapai 16,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp33.127.349.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp121.971.362.853,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp7.672.702.678,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp114.298.660.175,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp121.671.362.853,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp368.956.592,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.792.059.706,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.423.103.114,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp0,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.423.103.114,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp123.101.555.925,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6.423.103.114,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.992.910.042,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp121.671.362.853,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020

Uraian	Catatan	30 Juni 2021			30 Juni 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	504.000.000,00	370.574.092,00	73,53	342.359.500,00
Jumlah Pendapatan		504.000.000,00	370.574.092,00	73,53	342.359.500,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.044.226.000,00	2.226.964.961,00	55,07	1.924.657.833,00
Belanja Barang	B.4.	16.053.089.000,00	3.136.519.173,00	19,54	4.129.239.153,00
Belanja Modal	B.5.	13.030.034.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		33.127.349.000,00	5.363.484.134,00	16,19	6.053.896.986,00

II. NERACA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN NERACA PER 30 JUNI 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	300.000.000,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0,00	1.617.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	0,00	-6.873,00
Persediaan	C.1.4.	7.372.702.678,00	7.261.206.419,00
Jumlah Aset Lancar		7.672.702.678,00	7.262.817.046,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	80.183.520.000,00	80.183.520.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	40.086.936.994,00	40.086.936.994,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	26.411.729.491,00	26.411.729.491,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.766.731.600,00	1.766.731.600,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	51.000.000,00	51.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-34.201.257.910,00	-32.615.051.249,00
Jumlah Aset Tetap		114.298.660.175,00	115.884.866.836,00
Jumlah Aset		121.971.362.853,00	123.147.683.882,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	46.127.957,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2.	300.000.000,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		300.000.000,00	46.127.957,00
Jumlah Kewajiban		300.000.000,00	46.127.957,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	121.671.362.853,00	123.101.555.925,00
Jumlah Ekuitas		121.671.362.853,00	123.101.555.925,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		121.971.362.853,00	123.147.683.882,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	368.956.592,00	342.989.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		368.956.592,00	342.989.500,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.226.964.961,00	1.924.657.833,00
Beban Persediaan	D.3.	73.144.619,00	818.410.237,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.558.324.447,00	1.236.498.840,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	890.126.379,00	1.013.781.660,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	457.299.512,00	186.944.634,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.586.206.661,00	1.722.334.481,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-6.873,00	3.150,00
JUMLAH BEBAN		6.792.059.706,00	6.902.630.835,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.423.103.114,00	-6.559.641.335,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	101.100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0,00	71.775,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	29.325,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6.423.103.114,00	-6.559.612.010,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 dan 30 JUNI 2020**

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	123.101.555.925,00	125.101.346.215,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.423.103.114,00	-6.559.612.010,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	4.992.910.042,00	5.711.537.486,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.430.193.072,00	-848.074.524,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	121.671.362.853,00	124.253.271.691,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	504.000.000,00	504.000.000,00
Jumlah Pendapatan	504.000.000,00	504.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.044.226.000,00	4.044.226.000,00
Belanja Barang Operasional	1.787.038.000,00	1.801.738.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.259.975.000,00	2.303.436.000,00
Belanja Barang Persediaan	2.640.200.000,00	2.482.337.000,00
Belanja Jasa	834.800.000,00	807.600.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.783.020.000,00	1.791.860.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.921.266.000,00	1.709.868.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	5.500.000.000,00	5.156.250.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.904.000.000,00	12.847.734.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	182.300.000,00
Jumlah Belanja	35.674.525.000,00	33.127.349.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp370.574.092,00 atau mencapai 73,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp504.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	504.000.000,00	368.273.000,00	73,07
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	1.750.000,00	0,00

Uraian	2021			
	Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Denda		0,00	550.899,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain		0,00	193,00	0,00
Jumlah		504.000.000,00	370.574.092,00	73,53

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,24% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	.%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	368.273.000,00	333.744.500,00	10,35
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.750.000,00	8.015.000,00	-78,17
Pendapatan Denda	550.899,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	193,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	600.000,00	-100,00
Jumlah	370.574.092,00	342.359.500,00	8,24

Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 193. (Seratus sembilan puluh tiga rupiah). Merupakan pendapatan pajak sesuai dengan konfirmasi kebendahara gaji. Tindak lanjut akan dikoordinasikan dengan KPPN Setempat.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp5.363.484.134,00 atau 16,19% dari anggaran belanja sebesar Rp33.127.349.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2021

Uraian	2021			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		4.044.226.000,00	2.227.325.021,00	55,07
Belanja Barang		16.053.089.000,00	3.136.519.173,00	19,54

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Modal	13.030.034.000,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	33.127.349.000,00	5.363.844.194,00	16,19
Pengembalian Belanja		-360.060,00	0.00
Total Belanja	33.127.349.000,00	5.363.484.134,00	16,19

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -11,40% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

2. Kegiatan ini belum sepenuhnya berjalan. masih ada kegiatan yang belum berjalan

**Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	.%
Belanja Pegawai	2.226.964.961,00	1.924.657.833,00	15,71
Belanja Barang	3.136.519.173,00	4.129.239.153,00	-24,04
Total Belanja	5.363.484.134,00	6.053.896.986,00	-11,40

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.226.964.961,00 dan Rp1.924.657.833,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 15,71% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan pangkat dan gaji berkala

**Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.227.325.021,00	1.924.657.833,00	15,73
Jumlah Belanja Kotor	2.227.325.021,00	1.924.657.833,00	15,73
Pengembalian Belanja Pegawai	-360.060,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja	2.226.964.961,00	1.924.657.833,00	15,71

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.136.519.173,00 dan Rp4.129.239.153,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar -24,04% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan program refocusing anggaran dan program PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	804.352.157,00	442.830.720,00	81,64
Belanja Barang Non Operasional	519.683.960,00	547.059.983,00	-5,00
Belanja Barang Persediaan	190.548.606,00	1.831.287.950,00	-89,59
Belanja Jasa	280.416.287,00	293.290.745,00	-4,39
Belanja Pemeliharaan	884.218.651,00	827.825.121,00	6,81
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	457.299.512,00	186.944.634,00	144,62
Jumlah Belanja Kotor	3.136.519.173,00	4.129.239.153,00	-24,04
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.136.519.173,00	4.129.239.153,00	-24,04

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik/(Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2021

Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------	-------------

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2021
Uang Tunai didalam Brankas Bendahara	27.731.300,00
Uang di Rekening Bank Bendahara	272.268.700,00
Jumlah	300.000.000,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.617.500,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	1.617.500,00
Jumlah	0,00	1.617.500,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-6.873,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.372.702.678,00 dan Rp7.261.206.419,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	438.465.819,00	341.302.065,00
Bahan untuk Pemeliharaan	81.414.695,00	79.642.090,00
Suku Cadang	1.089.460.341,00	1.089.460.341,00
Bahan Baku	5.763.361.823,00	5.750.801.923,00
Jumlah	7.372.702.678,00	7.261.206.419,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp80.183.520.000,00 dan Rp80.183.520.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp40.086.936.994,00 dan Rp40.086.936.994,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.411.729.491,00 dan Rp26.411.729.491,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.766.731.600,00 dan Rp1.766.731.600,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp51.000.000,00 dan Rp51.000.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-34.201.257.910,00 dan Rp-32.615.051.249,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	40.086.936.994,00	-32.002.465.298,00	8.084.471.696,00
2.	Gedung dan Bangunan	26.411.729.491,00	-1.823.039.790,00	24.588.689.701,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.766.731.600,00	-333.252.822,00	1.433.478.778,00
4.	Aset Tetap Lainnya	51.000.000,00	-42.500.000,00	8.500.000,00
Akumulasi Penyusutan		68.316.398.085,00	-34.201.257.910,00	34.115.140.175,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp46.127.957,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua

belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0,00	46.127.957,00
Jumlah	0,00	46.127.957,00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp121.671.362.853,00 dan Rp123.101.555.925,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp368.956.592,00 dan Rp342.989.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	193,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	550.899,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0,00	600.000,00	-100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.500.000,00	8.015.000,00	-81,29
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	366.905.500,00	334.374.500,00	9,73
Jumlah	368.956.592,00	342.989.500,00	7,57

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.226.964.961,00 dan Rp1.924.657.833,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.536.922.160,00	1.321.304.260,00	16,32
Beban Pembulatan Gaji PNS	24.004,00	19.138,00	25,43
Beban Tunj. Anak PNS	33.267.092,00	30.674.316,00	8,45
Beban Tunj. Beras PNS	93.276.960,00	69.450.780,00	34,31

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	218.015.000,00	176.825.000,00	23,29
Beban Tunj. PPh PNS	5.905.813,00	2.221.525,00	165,85
Beban Tunj. Struktural PNS	17.640.000,00	20.160.000,00	-12,50
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	103.064.992,00	89.552.814,00	15,09
Beban Tunjangan Umum PNS	29.804.940,00	25.770.000,00	15,66
Beban Uang Makan PNS	189.044.000,00	188.680.000,00	0,19
Jumlah	2.226.964.961,00	1.924.657.833,00	15,71

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp73.144.619,00 dan Rp818.410.237,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	32.650.867,00	806.576.883,00	-95,95
Beban Persediaan konsumsi	40.493.752,00	11.833.354,00	242,20
Jumlah	73.144.619,00	818.410.237,00	-91,06

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.558.324.447,00 dan Rp1.236.498.840,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa

per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	29.111.358,00	46.617.719,00	-37,55
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	25.782.985,00	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	490.572.602,00	199.729.279,00	145,62
Beban Barang Operasional Lainnya	43.059.225,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.758.000,00	74.250.000,00	11,46
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	274.930.000,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	21.750.000,00	20.500.000,00	6,10
Beban Keperluan Perkantoran	565.656.811,00	272.043.068,00	107,93
Beban Langganan Air	13.859.000,00	12.230.300,00	13,32
Beban Langganan Listrik	194.737.973,00	208.649.010,00	-6,67
Beban Langganan Telepon	3.941.357,00	2.628.827,00	49,93
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	109.259.621,00	93.055.152,00	17,41
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.618.500,00	3.482.500,00	3,91
Beban Sewa	0,00	2.600.000,00	-100,00
Jumlah	1.558.324.447,00	1.236.498.840,00	26,03

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp890.126.379,00 dan Rp1.013.781.660,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	522.872.244,00	460.020.700,00	13,66
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.067.136,00	74.990.421,00	101,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.279.271,00	292.814.000,00	-28,19
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.052.428,00	32.489.669,00	-84,45
Beban Persediaan suku cadang	855.300,00	153.466.870,00	-99,44
Jumlah	890.126.379,00	1.013.781.660,00	-12,20

D.6. **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp457.299.512,00 dan Rp186.944.634,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	405.657.503,00	128.083.311,00	216,71
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	6.600.000,00	-27,27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.780.000,00	5.925.000,00	-36,20
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.062.009,00	46.336.323,00	-7,07
Jumlah	457.299.512,00	186.944.634,00	144,62

D.7. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.586.206.661,00 dan Rp1.722.334.481,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	256.827.395,00	256.827.395,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	37.960,00	37.960,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	40.310.590,00	40.310.591,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.286.030.716,00	1.422.158.535,00	-9,57
Jumlah	1.586.206.661,00	1.722.334.481,00	-7,90

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-6.873,00 dan Rp3.150,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020**

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-6.873,00	3.150,00	-318,19
Jumlah	-6.873,00	3.150,00	-318,19

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Uraian	Realisasi 30 Juni 2021	Realisasi 30 Juni 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-71.775,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	101.100,00	-100,00
Jumlah	0,00	29.325,00	-100,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp123.101.555.925,00 dan Rp125.101.346.215,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp-6.423.103.114,00 dan Rp-6.559.612.010,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.992.910.042,00 dan Rp5.711.537.486,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.363.484.134,00
Diterima dari Entitas Lain	-370.574.092,00
Jumlah	4.992.910.042,00

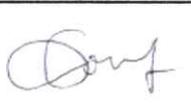
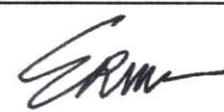
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-370.574.092,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.363.484.134,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1.430.193.072,00 dan Rp-848.074.524,00.

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian		Disusun oleh/Tanggal	Gordon Parulian S, SE
Inspektorat Jenderal		Direviu oleh/Tanggal	Kadi, S.Sos, MM
		Disetujui oleh/Tanggal	Agus Maryanto, S.Sos, MM
		Disahkan oleh/Tanggal	Ir. Bambang Purwiyanto, MM
UAPA	018	Kementerian Pertanian	
UAPPA-E1	06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	
UAPPA-W	0200	Provinsi Jawa Barat	
UAKPA	567275	BPMSPH Bogor	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
A Penyelenggaraan Akuntansi			
Penyelenggaraan akuntansi telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah didukung dengan sarana yang memadai.			
B Penyajian LK:			
1. LRA			KKR LRA
Realisasi Pendapatan senilai Rp370.574.092,00 atau sebesar 73,53% dari Target PNBP senilai Rp504.000.000,00			
Realisasi Belanja senilai Rp5.363.484.134,00 atau sebesar 16,19% dari Pagu senilai Rp33.127.349.000,00, namun terdapat pembayaran belanja barang Tahun 2020 yang direalisasikan di Tahun 2021			
2. LO			KKR LO
Pendapatan - LO senilai Rp368.956.592,00			
Beban Pemeliharaan senilai Rp890.126.379,00, namun berdasarkan LRA Belanja Pemeliharaan senilai Rp884.218.651,00			
3. LPE			KKR LPE
Tidak ada Masalah			
4. Neraca			KKR Neraca
Terdapat persediaan akhir senilai Rp7.372.702.678,00			
Terdapat aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan senilai Rp51.000.000,00			
5. CaLK			KKR CaLK
Tidak ada Masalah			
6. CaLBMN			KKR CaLBMN
Terdapat penjelasan Aset belum PSP senilai Rp148.506.288.085,00			
Rekomendasi			
1	Melakukan Aset Opname terhadap Bahan Perpustakaan senilai Rp51.000.000,00 untuk mengetahui kondisi barang saat ini		
2	Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan terhadap Aset yang belum PSP senilai Rp148.506.288.085		
PEREVIU		PETUGAS SAIBA BMN	
			
Gordon Parulian S PJ Eselon I		Erwin Yusuf	
		PETUGAS SIMAK BMN	
			
Hendra Wilson Sitanggang		Muhamad Iqbal	



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161
Telepon (0251) 8377111,8353712 Faksimili (0251) 8353712

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
ANTARA UAKPB DAN UAKPA
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : B-21002/KU.050/F5.A/07/2021

Pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara UAKPB dengan UAKPA Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (567275).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, melalui proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

Dalam Laporan Neraca SAK :

Total Aset Tetap	Rp.	121,971,362,853
Bagian Aset Lancar	Rp.	7,372,702,678
Aset Lainnya	Rp.	0
TOTAL	Rp.	129,344,065,531
SELISIH	Rp.	0

Dalam Laporan Neraca SIMAK - BMN

Total Aset Tetap	Rp.	121,971,362,853
Bagian Aset Lancar	Rp.	7,372,702,678
Aset Lainnya	Rp.	0
TOTAL	Rp.	129,344,065,531
SELISIH	Rp.	0

Keterangan : Tidak terdapat selisih dalam neraca Sistem Akutansi Keuangan (SAK), Hasil Rekonsiliasi dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Operator UAKPB

Muhammad Iqbal
NIP. 19790615 200003 1 003

Operator UAKPA

Erwin Yusuf Ekaputra
NIP. 19710506 200812 1 001

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Nasirudin, M.Sc.
NIP. 19650508 199003 1 001





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161
Telepon (0251) 8377111,8353712 Faksimili (0251) 8353712

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DAN PETUGAS UAKPA
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : **B-21003/KU.050/F5.A/07/2021**

Pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (567275).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, melalui proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

Dalam Laporan Neraca SAK :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Neraca	Rp.	300.000.000
2. Kas dalam Pembukuan Bendaharan Pengeluaran	Rp	300.000.000

Selisih	Rp	Nihil
---------	----	-------

Keterangan : Tidak terdapat selisih dalam neraca Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dengan Bendahara Pengeluaran

Hasil Rekonsiliasi dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bendahara Pengeluaran

Kudung Suroso

NIP 19850718 200910 1 001

Petugas UAKPA

Erwin Yusuf Ekaputra

NIP. 19710506 200812 1 001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Drh.Nasirudin.M.Sc.

NIP. 19650508 199003 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161
Telepon (0251) 8377111,8353712 Faksimili (0251) 8353712

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENERIMAAN DAN PETUGAS UAKPA
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : **B-21003/KU.050/F5.A/07/2021**

Pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara Bendahara Penerimaan dengan UAKPA Satker Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (567275).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, melalui proses pencocokan data dengan hasil sebagai berikut :

Dalam Laporan Neraca SAK :

1. Kas di Bendahara Penerimaan dalam Neraca	Rp. Nihil
2. Kas dalam Pembukuan Bendaharan Penerimaan	Rp. Nihil

Selisih	Rp. Nihil
---------	-----------

Keterangan : Tidak terdapat selisih dalam neraca Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dengan Bendahara Penerimaan

Hasil Rekonsiliasi dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bendahara Penerimaan

Angryani C. Perwitasari
NIP 19790902 200812 2 001

Petugas UAKPA

Erwin Yusuf Ekaputra
NIP. 19710506 200812 1 001

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Nasirudin M.Sc.

NIP. 19650508 199003 1 001

